

SEKURITISASI TERHADAP IMIGRAN NEGARA MAYORITAS MUSLIM DI AMERIKA SERIKAT ERA PRESIDEN DONALD TRUMP

Adi Joko Purwanto

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wahid Hasyim Semarang. Email: adijoko@unwahas.ac.id

Abstract

This article will explain Donald Trump's securitization process regarding the issue of immigrants which has been the main agenda of his campaign since he ran for US president. Trump as a securitizing actor, America as an object of security issues and Trump used the idea of security issues through the speech act. The Speech act regarding the issue of immigrants began at the beginning of his campaign until he elected as president of America. The Speech act was reiterated after Trump's hundred-day work at the White House and was implemented as a new migration policy, namely the banning of immigrants from 7 Muslim-majority countries where terrorism was inherent in Muslim society, especially after the 9/11 tragedy. The use of data in this paper uses internet-based methods.

Keywords: *Securitization, Securitizing Actor, object of security issues, Speech act, muslim immigrants*

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan proses sekuritisasi yang dilakukan Donald Trump terkait masalah imigran yang menjadi agenda utama dalam kampanyenya sejak mencalonkan diri sebagai presiden Amerika. Sekuritisasi yang berdasarkan pada pendekatan Copenhagen school pada isu ini yakni Trump sebagai securitizing actor, Amerika sebagai objek dari isu keamanan dan Trump menggunakan gagasan isu keamanan tersebut melalui speech act. Speech act mengenai isu imigran dimulai sejak awal masa kampanyenya hingga dia terpilih sebagai presiden Amerika. Speech act dinyatakan kembali setelah masa seratus hari kerja Trump di White House dan diimplementasikan menjadi kebijakan migrasi baru yakni pelarangan imigran dari tujuh negara mayoritas muslim dimana terorisme melekat dengan masyarakat muslim terutama pasca tragedi 9/11. Penggunaan data dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian berbasis internet.

Kata Kunci: *Sekuritisasi, Securitizing Actor, objek isu keamanan, Speech act, imigran muslim.*

A. PENDAHULUAN

Studi keamanan internasional pada awalnya berfokus pada isu seputar bidang militer dan kajian strategis. Pada perkembangannya, studi keamanan merupakan cabang dari politik, dan tetap memasukkan nilai realisme di dalamnya (Barry Buzan:1987). Ken Booth, dalam bukunya Theory of World and Security menjelaskan bahwa asumsi dari realisme yaitu politik internasional, yang merupakan arena konflik antar negara-negara berdaulat –

ide yang berasal dari nilai esensi manusia yang memiliki sifat egois, cemas, serta lingkungan yang bersifat anarki. realisme pasca Cold War berada pada kondisi dimana harus mempertahankan identitas power di situasi dunia yang terus berubah. Lalu pada pada era akhir 1980-an muncul gagasan mengenai keamanan non-tradisional (ancaman non-militer), bahwa isu militer yang merupakan ancaman utama negara tidak lagi menjadi ancaman utama. Munculnya aktor non-state dalam studi Hubungan Internasional juga ikut berpengaruh pada perkembangan isu keamanan global.

Melihat kembali tragedi 9/11 dimana negara tidak lagi hanya diancam oleh sesama warga negara, negara adidaya Amerika Serikat menyikapi ancaman global dimana pergerakan orang-orang yang melintasi batas-batas negara semakin dikonseptualisasikan sebagai risiko bagi keamanan nasional. Di Amerika Serikat tercipta pandangan adanya keterkaitan langsung antara warga asing, khususnya dari negara mayoritas muslim, dengan ancaman terorisme yang kemudian menjadi pusat dalam pembuatan kebijakan keamanan di negara-negara Barat. Kebijakan imigrasi terhubung langsung dengan kebijakan melawan terorisme seperti War on Terrorism yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan diberlakukan Undang-Undang yang memberikan kekuasaan pada Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk mendetensi, mendeportasi warga asing atau mengeksklusi warga asing yang diduga terlibat dalam aktivitas terorisme (Guild, 2005). Pasca tragedi 9/11 opini tentang islam sebagai teror bagi masyarakat internasional semakin menyeruak dan islam dianggap banyak mendukung aksi terorisme di Amerika Serikat.

Jika dilihat dari kajian global, isu imigran yang dijadikan alat kampanye bagi Donald Trump merupakan upaya sekuritisasi. Trump mengeluarkan pernyataan-pernyataan (speech act) lewat beragam pidato kampanyenya dan juga cuitan di sosial media yang menuai kontroversi. Termasuk tentang rencana kebijakan-kebijakan yang dijanjikan pada masa kampanye isu imigran bahwa setiap individu yang terlahir di luar negeri bertanggung jawab atas "berbagai" tindak kejahatan terorisme sejak 9/11, termasuk warga negara yang masuk ke AS dengan visa atau melalui program penerimaan pengungsi khususnya negara-negara dengan mayoritas islam.

Dari penjelasan latar belakang diatas, diperoleh pertanyaan penelitian: Bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Donald Trump sejak kampanye hingga terpilih menjadi presiden terhadap isu migrasi khususnya imigran dari negara-negara mayoritas muslim di Amerika Serikat?

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berbasis internet. Pengumpulan data berdasarkan artikel, dokumen, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan proses sekuritisasi Donald Trump terhadap isu imigran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Copenhagen School dan Sekuritisasi

Perubahan kajian keamanan tradisional menuju non-tradisional yang dipelopori oleh Barry Buzan, Ole Waever, serta beberapa pemikir disebut kelompok pemikir Copenhagen School. Ciri khas dari Copenhagen School adalah Societal Security (keamanan masyarakat) dan Securitization (sekuritisasi). Aliran keamanan yang dianut oleh Copenhagen School lebih kepada societal security atau keamanan masyarakat. Keamanan masyarakat dari Copenhagen School merujuk pada dua hal yaitu negara serta masyarakat dan merujuk pada ‘kemungkinan atau ancaman yang aktual’, dimana aktor politik sebagai penunjuk dari sumber ancaman dan identitas yang terancam. Keberhasilan suatu aktor dalam menunjukkan suatu isu menjadi sebuah ancaman bergantung pada keberhasilan aktor dalam mewacanakan keamanan. Pola tersebut merupakan konsep yang dikembangkan oleh Weaver yang dikenal dengan istilah sekuritisasi.

Copenhagen school terdapat lima dimensi keamanan dan referent object. Adapun lima dimensi tersebut meliputi ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan militer. Sementara itu, referent object dari keamanannya yaitu negara dan masyarakat. Suatu isu dapat dikatakan isu keamanan apabila aktor keamanan menyatakan melalui tindakan speech act bahwa isu tersebut merupakan ancaman (meskipun tadinya isu tersebut bersifat non-politik dan politik). Tindakan tersebut dikenal dengan istilah sekuritisasi, yang menjadi tawaran Copenhagen school terkait penyelesaian suatu ancaman.

Teori sekuritisasi sendiri dicetuskan oleh pemikir-pemikir Copenhagen School seperti Ole Wæver dan Barry Buzan. Definisi dari sekuritisasi dalam teori ini adalah bagaimana mengkonstruksi sebuah masalah menjadi isu keamanan dengan menggunakan speech act, dan kemudian menciptakan ide/wacana mengenai bagaimana masalah ini harus ditangani (Wæver dan Buzan, 2003, dikutip oleh Stritzel, 2007: 358).

Dapat dikatakan bahwa sekuritisasi merupakan bentuk ekstrem dari politisasi (Herta, 2017). Bahwa teori ini melihat fungsi dari speech act menunjukkan pengaruh teori sosial dan linguistik dalam perkembangan pemikiran Hubungan Internasional. Disini isu keamanan, khususnya bagaimana membuat suatu isu menjadi isu keamanan dilihat tidak semata dari kaca mata bahwa negara mempunyai kepentingan nasional.

Terdapat beberapa konsep dalam sekuritisasi untuk menunjukkan bagaimana aktor melakukan sekuritisasi. Konsep-konsep tersebut seperti securitizing actors (aktor sekuritisasi), speech act (pidato), existential threat (ancaman eksistensial), referent object (objek referensi), audience (pendengar) dan functional actor (aktor fungsional). Aktor sekuritisasi merupakan pihak yang mewacanakan sekuritisasi. Aktor tersebut melakukan tindakan sosialisasi ide atau speech act, dengan cara mengkampanyekan ancaman eksistensial yaitu isu-isu ancaman eksistensial yang diwacanakan. Tindakan sekuritisasi ditujukan terhadap audiens, atau pihak-pihak yang ingin dipengaruhi oleh aktor sekuritisasi untuk mempercayai bahwa terdapat ancaman yang nyata. Sedangkan aktor fungsional merupakan pihak yang melakukan ancaman nyata, artinya pelaku yang menyebabkan aktor sekuritisasi melakukan tindakan sekuritisasi. Keberhasilan aktor dalam melakukan sekuritisasi dapat dilihat ketika tindakan dari aktor tersebut mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk mengambil tindakan (sekuritisasi).

Terkait isu imigran di Amerika Serikat, diketahui objek keamanan adalah warga negara Amerika Serikat, Aktor sekuritisasi adalah Donald Trump sejak dia maju sebagai calon presiden dari Partai Republik hingga menjadi Presiden Amerika Serikat yang mengeluarkan speech act. Atau dalam hal lain yang biasanya mengambil peran adalah pemimpin politik, birokrat, pemerintah, pelobi, dan kelompok penekan (pressure groups). Aktor fungsional adalah aktor yang mempengaruhi proses penyampaian pidato diterima oleh audiens, tetapi aktor ini bukanlah objek keamanan maupun aktor sekuritisasi. Dalam hal ini audiens adalah masyarakat Amerika Serikat dan Functional Actor merupakan para pendukung Trump baik anggota Partai Republik maupun simpatisan kampanye.

Model sekuritisasi menurut Ralf Emmers (2007: 111-115) dilakukan melalui dua tahap yang terdiri atas dua indikator, antara lain adalah (1) keberhasilan sekuritisasi dan (2) tindakan luar biasa dan motif sekuritisasi. Kedua tahapan tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana dan kapan sebuah isu dilihat dan diperlakukan sebagai existential threat dalam keamanan (Emmers, 2007: 112). Tahap pertama adalah dengan

menggambarkan sebuah isu, orang-orang, atau entitas sebagai ancaman bagi objek keamanan (Emmers, 2007: 112). Tahap ini menjelaskan bagaimana aktor sekuritisasi menggunakan kekuasaannya untuk mempersepsikan bahwa isu tertentu merupakan sebuah ancaman yang nyata bagi keberlangsungan objek keamanan. Penyampaian persepsi ini melalui pernyataan-pernyataan. Sedangkan tahap kedua dapat terjadi apabila aktor sekuritisasi dapat meyakinkan audiens (opini publik, politisi, aparat militer, atau elit lainnya) bahwa objek keamanan benar-benar terancam, sehingga diperlukan tindakan luar biasa (Emmers, 2007: 112). Menurut Matt McDonald (2008: 114). Tahap kedua merupakan respon dari pernyataan yang telah diterima oleh audiens. Kemudian aktor sekuritisasi membuat aksi luar biasa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Aksi tersebut untuk meningkatkan level tindakan dari yang sebelumnya pernah dilakukan.

Islamophobia

Islamophobia muncul karena ada fenomena baru yang membutuhkan penamaan. Penggunaan istilah baru yaitu Islamophobia tidak akan menimbulkan konflik namun dipercaya akan lebih memainkan peranan dalam usaha untuk mengoreksi persepsi dan membangun hubungan yang lebih baik (Young European Muslims, 2002). Islamophobia adalah perasaan ketakutan atau kebencian terhadap Islam, orang-orang yang memeluk ajaran Islam, maupun budaya Islam. Istilah Islamophobia muncul pertama kali pada tahun 1922 dalam sebuah esai yang berjudul "L'orient vu de l'Occident" karya Etienne Dinet, seorang tokoh orientalis asal Perancis. Seiring berkembangnya waktu, pada sekitar tahun 1990-an Islamophobia dijadikan sebuah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan perlakuan diskriminatif yang diterima oleh umat Islam. Islamophobia memiliki beberapa karakteristik. Untuk memahami karakteristik ini dalam laporan Runnymede menjelaskan sebuah kunci untuk memahami perbedaan tersebut, yaitu pandangan yang terbuka dan pandangan yang tertutup terhadap Islam (open and closed views of Islam). Phobia dan ketakutan terhadap Islam yang terjadi merupakan karakteristik dari pandangan yang tertutup terhadap Islam.

Ancaman Keamanan Amerika Pasca Tragedi 9/11

Peristiwa World Trade Center (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 september 2001 atau yang dikenal dengan Black Tuesday tidak hanya mengejutkan bagi Amerika sendiri, tetapi juga seluruh dunia ikut terkejut dan mengutuk

serangan yang menewaskan ribuan warga tersebut. Dampak langsung dari serangan tersebut seperti kerusakan dan korban jiwa, dan juga dampak-dampak tidak langsung seperti dampak psikologis serangan tersebut terhadap warga Amerika.

Donald Trump dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang kontroversial, yang jauh berbeda dengan pemimpin sebelumnya yakni Barack Obama, Terutama dalam masalah imigran. Ada sebagian mengatakan bahwa slogan kampanye Trump "Make America Great Again" dimaknai sebagai mengembalikan "supremasi kulit putih". Trump dalam pandangan pribadinya terhadap Islam adalah orang yang perlu dicurigai apalagi pasca 9/11, dan di antara mereka yang masuk secara ilegal adalah mereka yang berusaha untuk menyakiti orang Amerika melalui tindakan teror atau tindakan kriminal. Trump juga mengatakan bahwa sejumlah besar populasi Muslim benci terhadap warga Amerika. Amerika tidak bisa kembali menjadi korban serangan kaum yang percaya pada konsep Jihad dan tidak memiliki nalar untuk menghormati sesama manusia. Pernyataan sengit tentang Muslim bukan hal baru bagi Trump, yang menyerukan agar pemerintah mengawasi masjid-masjid, dan menolak mengesampingkan usulan sebelumnya untuk mencatat nama-nama Muslim di Amerika dalam sebuah database. Imigrasi ilegal yang terus berlangsung menghadirkan bahaya yang jelas dan mengancam kepentingan Amerika Serikat.

Trump mengatakan,

“Until we are able to determine and understand this problem and the dangerous threat it poses, our country can not be the victims of horrendous attacks by people that believe only in Jihad, and have no sense of reason or respect for human life.”

Kebijakan pelarangan imigran tersebut juga dipengaruhi oleh sensitifitas Trump terhadap Islam yang dapat dilihat melalui cuitan-cuitan Twitter yang ia tulis dan bagikan, misalnya cuitan tentang penyerangan yang dilakukan oleh teroris di Orlando, di San Bernardino, di pusat Kota London, dan lain sebagainya.

Penyampaian Isu Imigran oleh Donald Trump: Dari Masa Kampanye hingga Setelah Terpilih Menjadi Presiden

Dalam pemilihan umum presiden Amerika Serikat 2016 lalu, isu imigrasi merupakan salah satu isu yang paling kompleks, dengan lebih dari dua puluh persen daftar pemilih menyatakan bahwa pandangan kandidat atas imigrasi menjadi faktor penting dalam pilihan mereka (Jones, 2015). Republikan Platform terhadap isu imigrasi

menyampaikan bahwa penegakkan hukum imigrasi harus menjadi prioritas tertinggi pemerintah AS. Trump sebagai kandidat presiden AS dari Partai Republik selalu menyebutkan penyampaian isu-isu terkait imigrasi. Pada pidatonya tanggal 26 Juli 2015, Trump menyampaikan bahwa rencana kebijakan imigrasinya akan dimulai dengan mendeportasi para imigran ireguler yang “jahat”, mengembalikan mereka ke tempat mereka berasal (Garver, 2015). Terkait isu keamanan nasional, terorisme dan kaitannya dengan isu imigrasi. Trump menyampaikan bahwa penyebab utama atas banyaknya kejadian teror salah satunya penembakan masjid di Orlando adalah karena AS membiarkan imigran dengan pandangan radikal Islam untuk masuk ke AS. Oleh karenanya, Trump menyampaikan rencana pelarangan imigrasi dari negara-negara dengan sejarah terorisme akan menjadi prioritasnya.

Setelah menang dalam pemilihan umum dan terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-45, Trump menjalankan seratus hari pertama pemerintahannya dengan mengeluarkan beberapa perintah eksekutif (executive orders). Enam hari berkuasa, Donald Trump mencabut Obamacare, memberlakukan kembali kebijakan Mexico City yang sekaligus menegaskan sikap anti-aborsinya, dan menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian Trans-Pacific Partnership (TPP). Lalu terkait isu imigrasi dan keamanan yang ia angkat pada masa kampanye, pada 27 Januari 2017, Trump mengeluarkan perintah “Executive Order: Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States” (The White House, 2017) yakni penangguhan imigran selama 120 hari. Ia juga melarang imigran dari tujuh negara muslim masuk ke AS, yaitu Suriah, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman. Dan memerintahkan peningkatan pemeriksaan imigran agar mencegah masuknya kelompok teroris dan radikal di AS. Pada 6 Maret 2017, perintah eksekutif presiden “Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States” direvisi, dengan Irak dikeluarkan dari daftar negara yang disuspen setelah pemerintah Irak mengatur prosedur pengetatan visa dan pembagian data dengan AS. (The White House, 2017).

Proses Sekuritisasi Donald Trump Terhadap Isu Imigran Negara-negara Mayoritas Muslim

Tahap satu sekuritisasi yang dilakukan oleh Donald Trump dimulai sejak mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Republik. Proses ini diawali dengan penyampaian pidato-pidato di hadapan konstituen dan masyarakat Amerika Serikat

selama masa kampanye. Trump menggunakan hak eksekutif presiden ini untuk melindungi rakyat Amerika. Pada 13 Juni 2016, Trump menyatakan, “When I am elected, I will suspend immigration from areas of the world when there is a proven history of terrorism against the United States, Europe or our allies, until we understand how to end these threats.” (Politico, 2016). Yakni mengambil pendirian yang tegas terhadap pembatasan imigran. Dan tahap pertama sekuritisasi berakhir ketika Trump ditetapkan menjadi pemenang pada pemilu tahun 2016. Ketika menjadi presiden, Trump menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut untuk mengeksekusi janji- janji politik terkait isu migrasi, salah satunya pelarangan imigran dari 7 Negara-negara mayoritas muslim karena negara-negara tersebut masuk ke dalam kategori "negara-negara yang diwaspadai" setelah disahkan undang-undang oleh Kongres yang didominasi anggota dari Partai Republik pada 2015 mengubah program penerimaan visa. Pada tahun 2016, Departemen Luar Negeri mencatat sejumlah 617.752 visa imigran dan 10.891.745 non-imigran (turis dan pekerja) telah dikeluarkan. Satu dari 20 visa imigran atau sekitar 30.000 visa imigran berasal dari tujuh negara muslim yang diblok oleh Trump tersebut. Larangan total yakni bagi imigran Suriah karena Suriah telah menjadi sorotan dunia akibat munculnya gerakan kelompok militan ISIS yang menjadi sumbu aksi teroris di seluruh dunia dan hampir setengah populasi negaranya yaitu sebanyak 11 juta jiwa mengungsi. ISIS mempunyai 60 rencana teror atau serangan di negara-negara Barat, termasuk 15 di Amerika Serikat dan terdapat 250 warga negara AS yang diketahui telah bergabung dengan kelompok-kelompok ekstrem berhaluan Islam.

Departemen Luar Negeri AS juga mencatat dari 12.587 pengungsi Suriah diantaranya didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Sisanya hanya 2% pemuda yang berhasil masuk, karena mereka dianggap paling rentan melakukan aksi terorisme dan radikalisme, sedangkan sejumlah 9.880 warga Irak melarikan diri dari perang sipil dan kelompok-kelompok teroris.

Tahap kedua dimulai sejak Trump menjadi presiden kemudian mengeluarkan kebijakan baru migrasi Amerika Serikat. Trump maju dengan jargon “Amerika Hebat Kembali”. Ancaman isu migrasi yang sudah peneliti paparkan sebelumnya menjadi poin utama Trump mewujudkan jargon tersebut. Peran Republican Platform menjadi penting, terutama setelah Trump terpilih menjadi kandidat yang mewakili Partai Republik. Republican Platform merupakan functional actors dalam proses sekuritisasi. Pidato-pidato Trump yang mengangkat permasalahan imigrasi tercatat disampaikan pada tanggal 16 Juni

2015, 26 Juli 2015, 13 Juni 2016, 22 Januari 2017, dan 27 Januari 2017. Poin penting dalam penyampaian pidato keamanan yang sukses adalah adanya proses pengalihan isu non-keamanan menjadi isu keamanan. Kedua, terdapat respon dukungan dari audiens (masyarakat Amerika Serikat) sehingga meyakini bahwa isu non-keamanan tersebut adalah isu keamanan. Penentuan bahwa pidato keamanan Trump berhasil adalah ditetapkannya beliau sebagai pemenang pemilu dengan mengantongi suara 304 electoral college (Shabad, 2017). Sementara syarat minimal seorang kandidat memenangkan pemilihan presiden adalah memenangkan 270 electoral college. Proses extraordinary measure Trump yakni tindakan menandatangani kebijakan-kebijakan baru, yaitu pelarangan imigran dari tujuh negara Muslim, lalu melakukan pemberhentian pejabat-pejabat penting yang dianggap menentang kebijakan imigrasi tersebut. Kedua kebijakan tersebut adalah eksekusi dari penyampaian pidato Trump sejak kampanye hingga dinyatakan menjadi Presiden AS. Kebijakan tersebut juga bersifat lebih ekstrem daripada kebijakan imigrasi yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Obama.

Trump tetap kukuh dengan keputusannya meski mendapat banyak kecaman terkait kebijakan kontroversialnya. Trump menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus konsisten dengan janji kampanye dan berani mengambil aksi dalam mencapai tujuan kemajuan negara. Selain dari perspektif seorang pemimpin, jika kita analisis dari dukungan parlemen Trump sangat wajar untuk terus mempertahankan keberhasilan pidato keamanannya motivasi untuk berjuang mewujudkan jargon andalannya “Make America Great Again”.

D. KESIMPULAN

Pasca tragedy 9/11, Amerika Serikat sebagai polisi dunia merasa terancam keamanannya dan memunculkan opini bahwa setiap muslim dianggap dalang dan mendukung banyaknya aksi terorisme di AS. Pada masa pemilihan presiden 2016, Trump dengan jargon MAGA berusaha menggambarkan bahwa Amerika sedang dalam kondisi di luar kendali. Terlebih masuknya belasan juta imigran yang semakin mengancam negara, khususnya imigran yang berasal dari negara-negara mayoritas muslim. Melalui penyampaian pidato keamanan (speech act), Trump mengalihkan isu migrasi menjadi isu nasional yang harus segera ditangani secara serius. Keberhasilan proses sekuritisasi ditunjukkan dengan dukungan yang kuat dari partai Republik dan simpatisan dan audiens

masyarakat selama proses pemilihan. Lalu, dilanjutkan dengan upaya extraordinary measure dengan disahkannya kebijakan pelarangan masuknya imigran dari 7 negara mayoritas muslim selama 90 hari dan memperkuat dukungan di pemerintahan dengan mengganti orang yang tidak mendukung Trump.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Sistem Klarifikasi Barang dan Pembeian Tarif Masuk atas Barang Impor.
- Barry Buzan. (1987). "introduction to Strategic Studies; Military Technology and International Relations" Dikutip dari www.academia.edu/10012303/Copenhagen_School_Sekuritisasi
- Buzan, Barry & Hansen, Lene. (2009). *The Evolution of International Security Studies*. New York: Cambridge University Press. Dikutip dari www.academia.edu/10012303/Copenhagen_School_Sekuritisasi
- Karl-Gerhard Lille. (2018). "Securitization of Immigration under the Trump Administration: Reconceptualizing the Functional Actor through the Judiciary and the Media". University of Tartu, Faculty of Social Sciences. Dikutip dari http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/60589/lille_karl_ma_2018.pdf
- Avissa Suseno. (2017). *Islamofobia dalam Kampanye Donald Trump (Analisis Wacana Berita Pernyataan Donald Trump Terhadap Islam pada Media Online Merdeka.Com)*. Dikutip dari repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/.../1/AVISSA%20SUSENO.PDF
- Sudagung, Rizky Amanda, Anggia UtamiDewi: "Sekuritisasi Donald Trump Terhadap Isu Migrasi dan Perbatasan. Dikutip dari pipt.untan.ac.id/index.php/seminarpipt/pipt2017/paper/view/48
- Philip Elliott. (2017). "Republicans Begin to Break With President Trump". Dikutip dari <http://time.com/4652966/donald-trump-refugee-ban-executive-order-republicans/>
- Khairisa Ferida. (2017). "Donald Trump Akan Resmikan Larangan Muslim Masuk ke AS". Dikutip dari <https://www.liputan6.com/global/read/2837676/donald-trump-akan-resmikan-larangan-muslim-masuk-ke-as#>
- Pikiran Rakyat. (2017). "10 Hal Seputar Kebijakan Imigran Trump yang Harus Diketahui". Dikutip dari <https://www.pikiran-rakyat.com/luar-negeri/2017/01/29/10-hal-seputar-kebijakan-imigran-trump-yang-harus-diketahui-391966> 06.54
- Migration Policy. (2016). "Immigration Under Trump Review Policy". <https://www.migrationpolicy.org/research/immigration-under-trump-review-policy-shifts/>
- Jack Goodman. (2017). "Donald Trump Larang Muslim Masuk ke Amerika". Dikutip dari <https://www.voaindonesia.com/a/donald-trump-larang-muslim-masuk-ke-amerika/3092984.html>
- Casey Tran. (2017). "Migration Policy Change" . Dikutip dari <http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/261041/actual-migration-policy-changes?p=all>

- Miriam Valverde. (2018). “Establish a Ban of Muslims Entering US” Dikutip dari <https://www.politifact.com/truth-o-meter/promises/trumpometer/promise/1401/establish-ban-muslims-entering-us/>
- Rob Garver. (2015). “Donald Trump Showed Why His Campaign Doomed”. Dikutip dari <http://www.thefiscaltimes.com/2015/07/26/Sunday-Donald-Trump-Showed-Why-His-Campaign-Doomed>
- Whitehouse.(2017). “Presidential Actions Executive Order Border Security Immigration Enforcement Improvement”. Dikutip dari <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-border-security-immigration-enforcement-improvements/>
- Jens Manuel Krogstad, Jeffrey S. Passel dan D'vera Cohn, "5 fakta tentang imigrasi ilegal di AS," Pew Research Center, terakhir diubah pada 27 April 2017, <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/27/5-fakta-tentang-ilegal-imigrasi-in-the-us/>
- Lembaga Kebijakan Migrasi, "Reformasi Imigrasi Komprehensif," Dikutip dari <http://www.migrationpolicy.org/topics/comprehensive-immigration-reform>